



**PEMERINTAH
KABUPATEN
KEBUMEN**

RENCANA KERJA TAHUN 2025

BPBD KABUPATEN KEBUMEN

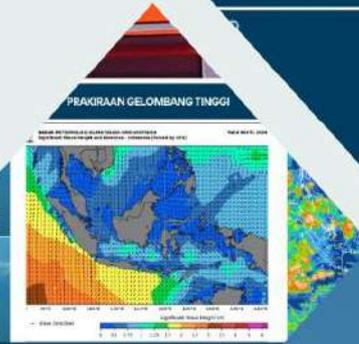


...melalui website BMKG.
...ndisi melalui Pengamatan V
...strial, dan Frekuensi Radio.
...an peringatan dini, administrasi, pe
...arurat Bencana Kekeringan dan Kar
...armada dan perlengkapan posko.

DOKUMENT



... DAN PERALATAN - Update Tanggal 14 Oktober 202



- Melaksanakan Picket Posko Siaga
- Melakukan pemantauan cuaca melalui website BMKG.
- Pemantauan Situasi dan Kondisi melalui Pengamatan Visual, website terkait, Media Sosial, dan Frekuensi Radio.
- Melaksanakan kegiatan peringatan dini, administrasi, pelaporan.
- Picket Posko Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla Kab. Kebumen.



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Juli 2024
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disusun. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kebumen, 11 Juli 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen



Drs. Udy Cahyono, M.Si
Pembina Utama Muda/ IVC
NIP. 196702261986071001

Daftar Isi

COVER	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..	11
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
B. Analisis Kinerja Layanan Perangkat Daerah.....	19
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	27
E. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	35
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
C. Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
A. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Catatan Penting	52
B. Kaidah Pelaksanaan.....	53
C. Rencana Tindak Lanjut	53
LAMPIRAN	54

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2023	12
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024.....	14
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen ...	19
Tabel 2. 4 Tantangan dan Peluang	25
Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kebumen	28
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025	41
Tabel 4. 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana kerja ini berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk satu tahun anggaran, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan tahunan, serta menjadi dasar bagi penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, dilakukan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan rencana kerja dimulai dengan analisis terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, diikuti dengan identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam tahun anggaran berikutnya. Tahapan ini mencakup penyusunan rancangan awal rencana kerja, yang kemudian dibahas melalui forum perangkat daerah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah aspek krusial yang harus diperhatikan untuk memastikan sinergi dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan di tingkat kabupaten dan berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat

prioritas pembangunan daerah yang harus diakomodasi dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga harus sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan utama perangkat daerah selama lima tahun. Rencana Strategis ini menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja setiap tahunnya, sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Tidak hanya itu, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen juga mempertimbangkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen sejalan dengan kebijakan dan prioritas yang ditetapkan di tingkat nasional dan provinsi, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan ini juga penting untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan menghindari terjadinya tumpang tindih program.

Tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah proses pengintegrasian program dan kegiatan yang telah direncanakan ke dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam tahap ini, Rencana Kerja menjadi dasar bagi penyusunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen. Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang tersedia, prioritas pembangunan, serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen merupakan langkah penting dalam mendukung terwujudnya penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Kebumen. Rencana Kerja ini tidak hanya menjadi alat perencanaan tahunan, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan memastikan bahwa pelaksanaan program penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terukur.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peaturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratutan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TengahTahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupeten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

C. Maksud Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Kebumen dimaksudkan untuk merumuskan dan menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman operasional bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana selama satu tahun anggaran. Selain itu, Rencana Kerja juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD ke dalam Rencana Tahunan;
2. Memastikan Sinergi dan Keterpaduan Perencanaan;
3. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi;
5. Mendukung Penyusunan Anggaran yang Efektif;
6. Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Masyarakat.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kelola, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Memuat kajian (review) terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2023) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKjIP;
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2024);
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan:

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari Indikator Kinerja Utaman Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah);
2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah (opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2025)

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun berjalan.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai Perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD).

- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan usulan Pokir DPRD).

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- C. Program dan Kegiatan
- Berisikan penjelasan mengenai:
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

- A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- C. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dilapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya, yakni Tahun 2025.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Kebumen ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan pada tahun yang lalu dan membandingkan dengan capaian sesuai target jangka menengah.

BPBD Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, dan terbagi ke dalam 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9.338.183.284,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.013.307.006,00 (96,52%) dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA	
			Keuangan		Fisik	(RP)	(%)
			(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.898.526.284	3.773.919.597	96,80	96,80	124.606.687	3,20
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.923.000	99,52	100,00	77.000	0,4
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000	15.923.000	99,52	100,00	77.000	0,4
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.803.942.284	2.704.979.604	96,47	96,47	98.962.680	3,53
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.609.168.284	2.510.502.597	96,22	96,22	98.665.687	3,78
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.774.000	194.477.007	99,85	99,85	296.993	0,15
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	100,00	100,00	-	0,00
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	24.000.000	100,00	100,00	-	0,00
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.960.000	235.668.443	99,45	99,46	1.291.557	0,55
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.600.000	5.422.000	96,82	96,82	178.000	3,18
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.000.000	47.744.650	99,47	99,47	255.350	0,53
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.200.000	23.122.100	99,66	99,66	77.900	0,34
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.160.000	2.157.000	99,86	99,86	3.000	0,14
9.	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	39.447.300	98,62	98,62	552.700	1,38
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.000.000	117.775.393	99,81	99,81	224.607	0,19
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	19.884.800	99,42	99,42	115.200	0,58
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.884.800	99,42	99,42	115.200	0,58
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.373.000	172.954.776	94,84	94,83	9.418.224	5,16
12.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.204.000	91,83	91,83	196.000	8,17
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	101.193.676	91,99	91,99	8.806.324	8,01
14.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	23.753.000	98,97	98,97	247.000	1,03
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.973.000	45.804.100	99,63	99,63	168.900	0,37
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.251.000	600.508.974	97,60	97,61	14.742.026	2,40

16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	286.621.574	95,54	95,54	13.378.426	4,46
17.	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	1.995.000	99,75	99,75	5.000	0,25
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.995.000	99,94	99,94	5.000	0,06
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.251.000	303.897.400	99,56	99,56	1.353.600	0,44
B.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.439.657.000	5.239.387.409	96,32	96,32	200.269.591	3,68
VIII.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	460.180.000	457.990.215	99,52	99,52	2.189.785	0,48
20.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	74.494.500	99,33	99,33	505.500	0,67%
21.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	385.180.000	383.495.715	99,56	99,56	1.684.285	0,44%
IX.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.685.740.000	1.667.831.748	98,94	98,94	17.908.252	1,06
22.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	49.617.400	99,23	99,23	382.600	0,77
23.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	98.859.000	98,86	98,86	1.141.000	1,14
24.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	435.740.000	427.277.623	98,06	98,06	8.462.377	1,94
25.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	350.000.000	345.955.800	98,84	98,84	4.044.200	1,16
26.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	49.432.700	98,87	98,87	567.300	1,13
27.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	400.000.000	397.789.125	99,45	99,45	2.210.875	0,55
28.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	99.409.900	99,41	99,41	590.100	0,59
29.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	200.000.000	199.490.200	99,75	99,75	509.800	0,25
X.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.329.237.000	2.167.282.545	93,05	93,05	161.954.455	6,95
30.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.029.237.000	1.993.671.156	98,25	98,25	35.565.844	1,75
31.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	73.739.989	36,87	36,87	126.260.011	63,13
32.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	99.871.400	99,87	99,87	128.600	0,13
XI.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	964.500.000	946.282.901	98,11	98,12	18.217.099	1,89
33.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	72.915.900	97,22	97,22	2.084.100	2,78
34.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	74.787.700	99,72	99,72	212.300	0,28
35.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	814.500.000	798.579.301	98,05	98,05	15.920.699	1,95
	JUMLAH	9.338.183.284	9.013.307.006	96,52	96,52	324.876.278	3,48

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kabupaten Kebumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Program Renstra tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Prog / Keg Renja pada th berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian	Tingkat Capaian
					6	7	8 (7/6)			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	21	4	4	4	100 %	4	12	57 %
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	4	4	4	100 %	4	12	57 %
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	18	18	18	100 %	18	54	60 %
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	12	12	100 %	12	36	54 %
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	90	18	18	18	100 %	0	40	40 %
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90	18	18	18	100 %	0	40	40 %
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %

1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15	2	2	2	100 %	2	2	100 %
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	0	2	0	0 %	0	0	100 %
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	0 %	0	0	100 %
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	2	2	2	100 %	2	2	100 %
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %

		Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60	12	12	12	100 %	12	36	60 %
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48		12	12	100 %	12	24	50 %
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	1	1	100 %	1	3	60 %
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	100 %							
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	100 %							
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2	1	1	1	100 %	0	2	100 %
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %							

1.05.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	4	1	1	1	100 %	-	2	50 %
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnegara dan warga negara yang ikut pelatihan	825	100	125	125	100 %	200	425	52 %
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga Negara yang mendapat layanan pus dalops penanggulangan bencana dan sarana pra sarana penanggulangan bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5	1	1	1	100%	1	3	60 %
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terkelolanya risiko bencana kabupaten	60	12	12	12	100%	12	36	60 %
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase pembentukan desa tangguh bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah paket penanganan pasca bencana	25	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	450	50	100	100	100 %	100	250	56 %
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	1	-	-	-	-	-	-	-
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1800	200	400	400	100 %	400	400	100 %
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %							

1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan darurat kebencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah paket logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10	2	2	2	100%	2	6	60 %
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	100 %	100%						
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	6	1	1	1	100%	1	3	50 %
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan bencana (Relawan)	10	2	2	2	100%	2	6	60 %
1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Aman bencana yang dilaksanakan	70	10	15	15	100%	15	40	57 %

B. Analisis Kinerja Layanan Perangkat Daerah

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. Setiap organisasi perangkat daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator kinerja utama BPBD Kabupaten Kebumen adalah Persentase Pembentukan Desa Tangguh Bencana.

Selain indikator kinerja utama pada BPBD Kabupaten Kebumen, terdapat pula amanat mengenai standar pelayanan minimal (SPM) Sub Urusan Bencana yang menjadi target dalam rangka penyelenggaraan bencana. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun tingkat capaian kinerja BPBD Kabupaten Kebumen berdasarkan pada Renstra 2021 s.d 2026 terkait Indikator Kinerja Utama dan indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen

NO	Indikator		SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD Tahun ke				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
					(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	Persentase Desa Tangguh Bencana			Persentase desa tangguh bencana	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
2	a.	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	b.	Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
3	a.	Tersedianya Dokumen resmi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	b.	Tersedianya dokumen resmi Rencana Kontinjensi			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

	c.	Terlaksananya Pelatihan pencegahan dan mitigasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	d.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	e.	Terlaksananya Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Operasional PUSDALOP PB 24 jam
	f.	Tersedianya peralatan dan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	a.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SPM pada Dinas Kesehatan
	b.	Respon cepat darurat bencana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	c.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	d.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yaitu pembentukan desa siaga/ tangguh bencana di Kabupaten Kebumen dan sebanyak 460 desa/kelurahan telah selesai dilaksanakan pembentukannya pada tahun 2021. Sebagai upaya Destana yang sudah dibentuk agar bisa berjalan dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas pada Destana. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapaitas bagi Destana sejumlah 30 (tiga puluh) Desa.
- b. Indikator SPM Sub-Urusan bencana sebagaimana yang termuat dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, capaian sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kebumen telah tercapai 100 %.
 - Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana sampai dengan akhir tahun 2023 telah dilaksanakan pada penduduk yang berada di kawasan rawan bencana dengan risiko sedang dan tinggi sejumlah 726.453 orang dengan capain 100 (seratus) %.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Adanya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
 - Adanya dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah ada sejumlah 4 dokumen meliputi renkon Tsunami, Banjir dan 2 renkon Waduk (Wadaslintang dan Sempor);
 - Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana di tahun 2023 dengan peserta sejumlah 400 (empat ratus) orang;
 - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana berupa layanan PUSDALOPS PB selama 24 jam yang sudah bisa terhubung ke semua wilayah Kecamatan;
 - Penyediannya peralatan dan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2023 berupa 425 unit Alat Perlindungan Diri (APD).
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan mengeluarkan 2 dokumen pernyataan darurat bencana oleh Bupati;
 - Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana terhadap 467 orang korban terdampak bencana;
 - Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana terhadap 467 orang korban terdampak bencana.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan BPBD Kebumen menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam respons terhadap bencana, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Dalam hal respons waktu, BPBD Kebumen mampu merespons dengan cepat saat terjadi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, dengan melakukan evakuasi dan penanganan darurat yang memadai. Selain itu, juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi.

Namun, ada beberapa hal kritis yang mempengaruhi pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu masalah utama. Jumlah personel yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan besarnya wilayah dan

jumlah potensi bencana yang ada. Kedua, alat dan perlengkapan yang digunakan untuk penanganan bencana masih belum memadai, seperti kendaraan operasional yang terbatas, yang dapat menghambat proses evakuasi dan penanganan.

Koordinasi dengan instansi terkait juga perlu ditingkatkan. Meskipun BPBD Kabupaten Kebumen sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, terkadang komunikasi dan pengaturan bantuan masih kurang efisien, terutama dalam situasi darurat. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana masih perlu ditingkatkan, mengingat banyaknya informasi yang belum tersampaikan secara optimal. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Kebumen harus terus berupaya memperkuat kapasitas dan infrastruktur, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam program-program mitigasi bencana untuk mencapai pelayanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, BPBD Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas kinerjanya. Berikut adalah beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

BPBD Kabupaten Kebumen sering kali kekurangan personel yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani situasi darurat. Jumlah tenaga yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah potensi bencana yang harus dihadapi. Hal ini dapat mengakibatkan lambatnya respons dalam penanganan bencana.

2. Infrastruktur dan Peralatan yang Tidak Memadai

Keterbatasan infrastruktur alat dan perlengkapan, seperti bangunan gedung kantor, kendaraan operasional dan peralatan untuk penanganan bencana, menjadi hambatan. Gedung kantor BPBD Kebumen terutama untuk sekretariat merupakan bangunan lama dan using, sehingga perlu ada pembangunan/ perbaikan. Peralatan dan perlengkapan untuk penanganan bencana yang ada sudah usang atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga menghambat efisiensi dalam proses evakuasi dan penanganan bencana.

3. **Koordinasi Antarinstansi yang Lemah**

Meskipun BPBD Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan berbagai pihak/ instansi, sering kali terdapat kendala dalam koordinasi yang mengakibatkan informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam situasi darurat dapat menghambat efektivitas respon.
4. **Terbatasnya Pendanaan**

Pendanaan yang terbatas sering kali menghambat pelaksanaan program mitigasi bencana dan pelatihan bagi personel. BPBD Kabupaten Kebumen membutuhkan anggaran yang memadai untuk pengadaan peralatan, pelatihan, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
5. **Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Rendah**

Masyarakat yang kurang sadar akan risiko bencana dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang langkah-langkah kesiapsiagaan dapat menjadi tantangan terutama di kawasan yang memiliki risiko tinggi bencana. Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang belum optimal membuat masyarakat kurang siap menghadapi bencana, sehingga dapat memperburuk dampak ketika bencana terjadi.
6. **Geografi dan Karakteristik Wilayah**

Kebumen memiliki wilayah dengan topografi yang beragam, termasuk pegunungan dan pesisir, yang membuat beberapa daerah sulit dijangkau. Hal ini dapat menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan, terutama di daerah terpencil.
7. **Perubahan Iklim dan Frekuensi Bencana**

Perubahan iklim yang menyebabkan pola cuaca yang tidak menentu dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. BPBD Kabupaten Kebumen perlu beradaptasi dengan kondisi ini, yang sering kali memerlukan pendekatan dan strategi baru dalam mitigasi dan penanganan bencana.
8. **Manajemen Data dan Informasi**

Pengelolaan data dan informasi yang kurang baik dapat menghambat pengambilan keputusan. Data yang tidak akurat atau terlambat diterima dapat memengaruhi efektivitas dalam merespons bencana.

Dengan mengidentifikasi permasalahan dan hambatan ini, diharapkan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penanganan bencana di wilayah.

Meskipun BPBD Kabupaten Kebumen menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, dan tantangan koordinasi antarinstansi, hal ini tidak serta-merta berdampak negatif terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional dan internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Pertama, BPBD Kabupaten Kebumen menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan memaksimalkan potensi yang ada, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi personel, BPBD mampu meningkatkan efisiensi dalam penanganan bencana, yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat. Selain itu, kerjasama yang erat dengan organisasi masyarakat dan relawan memungkinkan BPBD untuk memperluas jangkauan pelayanan dan respons dalam situasi darurat.

Kedua, meskipun terdapat keterbatasan dalam infrastruktur, BPBD Kabupaten Kebumen telah berhasil memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam penanganan bencana. Penggunaan aplikasi dan platform digital memungkinkan untuk menyampaikan informasi dengan cepat kepada masyarakat dan instansi terkait, sehingga mempercepat respons bencana dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Ketiga, komitmen BPBD dalam menjalankan program-program mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat menunjukkan upaya proaktif untuk mencapai SDGs. Dengan fokus pada pendidikan dan kesadaran masyarakat, BPBD Kabupaten Kebumen dapat mengurangi risiko bencana melalui partisipasi aktif masyarakat, meskipun tantangan tetap ada. Hal ini selaras dengan tujuan SDGs yang mengedepankan ketahanan dan pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, meskipun BPBD Kabupaten Kebumen menghadapi sejumlah tantangan, strategi adaptif dan kolaboratif yang diterapkan memungkinkan pencapaian visi dan misi Bupati serta target

SPM dan SDGs tetap berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan inovasi dalam pengelolaan bencana dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada, sehingga tidak menghalangi kemajuan dalam pembangunan daerah.

BPBD Kabupaten Kebumen dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tentunya memiliki tantangan dan peluang guna meningkatkan kualitas pelayanannya. Tantangan dan peluang BPBD Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Tantangan dan Peluang

No	Aspek	Tantangan	Peluang
1.	Isu Global	Penanggulangan bencana menjadi perhatian internasional, membutuhkan pengelolaan yang holistik dan terintegrasi.	Terdapat dukungan internasional dan kerja sama lintas negara dalam penanggulangan bencana
2.	Kepadatan Populasi	Banyak masyarakat tinggal di daerah rawan bencana, mengurangi pilihan untuk relokasi dan meningkatkan risiko.	Kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui edukasi tentang mitigasi bencana dan langkah-langkah evakuasi
3.	Kesiapsiagaan	Kesiapsiagaan pemangku kepentingan masih rendah, menghambat respon yang cepat saat bencana terjadi	Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat serta relawan penanggulangan bencana dapat meningkatkan kesiapsiagaan secara keseluruhan.
4.	Koordinsai	Koordinasi antar instansi dan masyarakat sering kali kurang efektif, mengakibatkan respon yang lambat.	Pembentukan pusat informasi bencana dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait.
5.	Dokumentasi	Praktik penanggulangan bencana tidak terdokumentasi dengan baik, menghambat pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.	Pembentukan sistem informasi dan database penanggulangan bencana dapat memfasilitasi dokumentasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan di masa depan.
6.	Batas Wilayah	Bencana yang melintasi batas administratif memerlukan kerjasama yang lebih baik antara daerah.	Kerjasama lintas daerah dapat ditingkatkan melalui forum koordinasi antar daerah untuk penanganan bencana yang lebih efektif.
7.	Regulasi	Belum ada regulasi yang memadai terkait standarisasi bangunan di daerah rawan bencana, meningkatkan kerentanan.	UU No. 24 Tahun 2007 dan UU No. 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum untuk peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPBD
8.	Sumber Daya	Kualitas sumber daya manusia di BPBD masih terbatas, dengan kompetensi yang belum optimal.	Peluang untuk peningkatan kompetensi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi internasional.
9.	Pendanaan	Penganggaran untuk kebencanaan masih bersifat normatif, kurang fleksibel	Dana CSR dari sektor swasta dan partisipasi masyarakat dapat dimaksimalkan untuk

		dalam menghadapi kondisi darurat.	mendukung kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan
10.	Teknologi	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan.	Pengembangan teknologi pemetaan dan aplikasi untuk pengelolaan data kebencanaan dapat meningkatkan efektivitas monitoring dan respons

Salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah kondusivitas wilayah dan kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana. Wilayah yang kondusif sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga keamanan serta kenyamanan kehidupan masyarakat. Kondisi stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat suatu daerah dapat mempengaruhi kualitas kinerja pemerintahan yang dapat dilihat dari indeks kondusivitas wilayah. Indeks ini terdiri dari komponen persentase penegakkan perda dan persentase desa tangguh bencana. Pada tahun 2023 indeks kondusivitas wilayah Kabupaten Kebumen mencapai 100% hal ini merepresentasikan bahwa kondisi stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kebumen sudah kondusif meskipun masih terdapat kasus kriminalitas, kasus narkoba, serta demonstrasi. Terkait SPM Bidang Trantibum, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama respon time kebakaran selama 15 menit, khususnya untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun, sedangkan pemenuhan SPM penanggulangan bencana telah dibentuk Desa Tangguh Bencana di 460 Desa/kelurahan (100%).

Selain itu, tata kelola pemerintahan juga perlu didukung dengan tata kelola kebencanaan mengingat kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Kebumen berpotensi terjadi bencana yang mengancam kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. IRBI Kabupaten Kebumen tahun 2023 yaitu 110,78, angka ini meningkat (lebih buruk) dibandingkan tahun 2022 pada angka 102,5. Dari ketiga komponen pembentuk IRBI, untuk menurunkan risiko bencana dapat diupayakan dengan menurunkan komponen kerentanan dan peningkatan komponen kapasitas dalam penanggulangan bencana.

Dengan memperhatikan isu serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan dan penguatan sistem komunikasi, operasi, data dan sistem informasi, diklat serta logistik bencana;
4. Pemenuhan standar kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan SDM;
5. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
6. Peningkatan efektivitas pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana;
8. Peningkatan kemampuan aparaturnya, masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan bencana.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan hasil analisis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kebumen

SKPD : BPBD Kabupaten Kebumen

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN					3.973.949.739	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN					3.973.949.739
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	50.000.000		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.802.245.739	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.802.245.739
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	2.454.661.739	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	2.454.661.739		
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	347.584.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	347.584.000		
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah					267.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah					267.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.000.000		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	48.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	48.000.000		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	23.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	23.000.000		

4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.200.000	
4	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	36.800.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	36.800.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laoproan	150.000.000	
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				175.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				175.000.000	
1	Pengadaan Mebel	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	100.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	75.000.000	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.704.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.704.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	125.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	31.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	31.000.000	

4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	16.704.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	16.704.000	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	300.000.000	
2	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	47 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	47 unit	5.000.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	200.000.000	
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.998.244.400	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.847.452.400	
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				330.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				330.000.000	
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	726.453 orang	330.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	716.453 orang	330.000.000	

II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.430.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.430.000.000	
1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 paket	150.000.000	
2	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 orang	160.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 orang	160.000.000	
3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	660.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	50 kawasan /desa	660.000.000	
4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	90 Orang	90.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 orang	90.000.000	
5	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dok	100.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dok	100.000.000	
6	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	1 dok	95.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 dok	95.000.000	
7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 laporan	75.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 laporan	75.000.000	

8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 orang	100.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 orang	100.000.000	
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.493.244.400	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.342.452.400	
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 dokumen	2.160.244.400	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 dokumen	2.009.452.400	
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	183.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	183.000.000	
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 orang	150.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 orang	150.000.000	
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				745.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				745.000.000	
1	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 dok	75.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 dok	75.000.000	
2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		20.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 dokumen	20.000.000	

3	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 kegiatan	600.000.000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 kegiatan	600.000.000	
4	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dok	50.000.000	
JUMLAH TOTAL (A+B)					8.972.194.139	JUMLAH TOTAL (A+B)					8.821.402.139

E. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyesuaian usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Kebumen.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

Untuk mendukung agenda pembangunan nasional ke-6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024. Arah kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 adalah:

1. Penanggulangan bencana diarahkan pada sistem dan strategi yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan;
2. Penanggulangan bencana harus menyiapkan sumberdaya yang memadai dalam rangka pencegahan untuk menghadapi bencana;
3. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa dan meminimalisir kerusakan fisik dan kerugian ekonomi;
4. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan Kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman;
5. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*.

Sedangkan strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 adalah:

1. Pemantapan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Peningkatan tata kelola, Pembinaan, dan Pengawasan;
3. Pengarusutamaan Gender, inklusif disabilitas dan berketahanan bencana;
4. Perencanaan dan penganggaran yang terpadu; dan
5. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Tujuan dimaksud akan dicapai dengan lima sasaran perangkat daerah yaitu:

1. Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Meningkatkan kapasitas upaya mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana, dalam hal ini penanganan bencana dalam fase Pra Bencana (baik tidak ada bencana ataupun ada ancaman bencana) menjadi penanganan bencana yang lebih murah dan efektif mengurangi risiko dan dampak bencana.

2. Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan.

Meningkatkan kapasitas penanganan darurat dan analisis kebencanaan dengan perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana dan masih belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Isu strategis ini ditingkatkan dengan kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana dengan melatih kapasitas teknis dan managerial untuk penanganan awal darurat bencana dengan perangkat daerah dan kapasitas sumber daya lainnya.

3. Meningkatkan Upaya Pemulihan Bencana;

Peningkatan upaya pemulihan bencana perlunya peran serta masyarakat yang inklusif dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan utamanya pada fase pra dan pasca bencana.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; dan

Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah, dalam hal ini pentingnya menjaga performa pelayanan kepada masyarakat

dengan beberapa kegiatan penunjang dalam kegiatan rutin tata usaha. Nilai kepuasan masyarakat dalam hal ini keterbukaan informasi PPID menjadi salah satu tolak ukur keterbukaan informasi perangkat daerah.

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat.

Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Proses manajemen risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan reuiu, dan komunikasi dan konsultasi.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan prioritas daerah tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana; dan Reviu berkala Dokumen Kajian Risiko Bencana;
2. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana melalui Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan; Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana; Penyusunan dan Reviu Dokumen Rencana Kontijensi; Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana; Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Reviu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana; Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
3. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai ialah “Mewujudkan Kondusifitas Wilayah” dengan sasaran “Terwujudnya Wilayah Tangguh Bencana”. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan upaya mendukung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2024 yaitu “Men-Tambeng” (Kebumen Tangguh Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana).

Untuk menuju sasaran terwujudnya wilayah tangguh bencana di Kabupaten Kebumen, maka yang paling penting adalah membangun ketangguhan yang diawali dengan membangun ketangguhan di desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen, baik yang memiliki risiko bencana tinggi, sedang, maupun rendah. Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana yang telah mulai dibentuk pada Renstra periode yang lalu (2016-2021) tetap menjadi prioritas utama dalam renstra BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Desa tangguh bencana yang telah terbentuk akan selalu ditingkatkan kapasitasnya, sehingga desa yang masuk dalam klasifikasi desa tangguh utama dan madya semakin banyak, sedangkan Desa Tangguh Pratama semakin sedikit.

Sejalan dengan upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana yang digencarkan oleh Pemerintah Pusat, dan Provinsi Jawa Tengah kepada semua kabupaten, yang indikator pencapaian SPM tersebut memiliki makna peningkatan ketangguhan wilayah dalam menangani bencana baik pada saat pra-bencana, saat terjadi bencana (tanggap darurat) maupun setelah terjadi bencana (pasca bencana), maka dalam rangka menuju terbentuknya ketangguhan wilayah dalam hal penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas desa tangguh bencana melalui sosialisasi kebencanaan, pelatihan kebencanaan, penyebarluasan informasi kebencanaan, gladi kebencanaan tetap diprioritaskan bagi desa-desa/kelurahan yang memiliki risiko bencana yang tinggi, dengan tidak mengesampingkan desa-desa/kelurahan yang berada di kawasan yang memiliki risiko bencana lebih rendah.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023		
1.	Mewujudkan Kondusifitas Wilayah		Prosentase Desa Tangguh Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Wilayah Tangguh Bencana	Prosentase Desa Tangguh Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %

C. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. BPBD Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang juga mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub-urusan bencana juga telah merencanakan pelaksanaan program/kegiatan yang bertujuan memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen, telah direncanakan pelaksanaan program, kegiatan/sub-kegiatan di tahun 2025 yang terdiri atas 2 Program, 10 kegiatan yang terdiri atas 33 sub-kegiatan sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, yang terdiri atas Kegiatan/Sub-Kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Penyediaan Bahan/Material;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Mebel;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- II. Program Penanggulangan Bencana, yang terdiri atas Kegiatan/Sub Kegiatan:
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - a. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota;

- b. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 - c. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota;
 - e. Penyusunan Rencana Kontinjensi;
 - f. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - g. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 - h. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota;
 - b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota;
 - c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- a. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
 - c. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
 - d. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten /Kota;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen ini disusun dengan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dengan berpedoman kepada Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026, serta dengan mempertimbangkan usulan hasil Musrenbang Desa yang ditujukan kepada BPBD Kabupaten Kebumen. Selain itu juga dengan mempertimbangkan saran dan masukan peserta Forum Perangkat Daerah, baik dari anggota DPRD, Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang telah disepakati dalam Forum Perangkat Daerah BPBD kabupaten Kebumen tahun 2024.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							NASIONAL	DAERAH			
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			8.821.402.139							9.873.344.313
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.821.402.139							9.873.344.313
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8.821.402.139							9.873.344.313
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.973.949.739						-	4.351.544.313
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000			-		-	-	55.000.000
1.05.01.2.01.0001	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>50.000.000</i>	<i>Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	-	<i>Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana</i>	-		55.000.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.802.245.739			-		-	-	3.082.470.313
1.05.01.2.02.0001	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>18 Orang</i>	<i>2.454.661.739</i>	<i>Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen</i>	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	-	<i>Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana</i>	-		2.700.127.913

1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	347.584.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		382.342.400
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	267.000.000			-		-	-	293.700.000
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		7.700.000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		52.800.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		25.300.000
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.200.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		2.420.000
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	36.800.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		40.480.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		165.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	175.000.000			-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-	-	192.500.000
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	100.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-	-	110.000.000

1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	75.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		82.500.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	174.704.000			-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-	-	172.374.000
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		2.200.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		126.500.000
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	31.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		25.300.000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.704.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		18.374.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	505.000.000			-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-	-	555.500.000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	300.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		330.000.000
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	47 Unit	5.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduktivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		5.500.000

1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3 Unit	200.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		220.000.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	4.847.452.400				Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana		-	5.521.800.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	330.000.000			-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-	-	363.000.000
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	726453 Orang	330.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		363.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.430.000.000			-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-	-	1.573.000.000
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 paket/ Unit	150.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		165.000.000

1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	160.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		176.000.000
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	50 Kawasan	660.000.000	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		726.000.000
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	90 Orang	90.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		99.000.000
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		110.000.000
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	95.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		104.500.000
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	12 laporan	75.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		82.500.000
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 orang	100.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		110.000.000

1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	2.342.452.400			-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-	-	2.766.300.000
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2.009.452.400	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		2.400.000.000
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	183.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		201.300.000
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	150.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		165.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	745.000.000			-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-	-	819.500.000
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		82.500.000
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	20.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		22.000.000

1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Kegiatan	600.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		660.000.000
1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana	-		55.000.000
J U M L A H				8.821.402.139						9.873.344.313	

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran serta tolok ukur untuk mengukur hasil capaian kinerja dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub-kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Kebumen dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kebumen.

Sesuai dengan Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu: “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat.

Prioritas yang didukung oleh BPBD Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas dan fungsinya pada prioritas kelima. Wilayah yang kondusif sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga keamanan serta kenyamanan kehidupan masyarakat. Kondisi stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat suatu daerah dapat mempengaruhi kualitas kinerja

pemerintah. Selain itu, tata kelola pemerintahan juga perlu didukung dengan tata kelola kebencanaan mengingat kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Kebumen berpotensi terjadi bencana yang mengancam kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

B. Kaidah Pelaksanaan

Dengan telah disepakati dan dan ditetapkannya dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka kaidah pelaksanaannya adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2025 selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kabumen, 11 Juli 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen



Drs. Udy Cahyono, M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 196702261986071001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo N	Mf.
Cahyo Riyadi	

LAMPIRAN

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi rencana program dan kegiatan tahun 2025 oleh Bapak Haryono Wahyudi, S.T.,M.T. (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2024

Jam : 16.00 WIB

Tempat : Hotel Mexolie

Forum Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

MENYEPAKATI:

- KESATU** : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 15 Februari 2024
Pimpinan Sidang

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



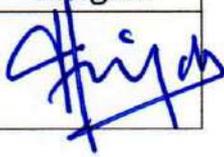
HARYONO WAHYUDI, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19740126 199903 1 004

Menyetujui:

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen

No.	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1		DPRD		
2	Ibnu Sayfudin, SH.	Unsur Perangkat Daerah	Inspektorat	
3	Parno, SIP, MM	Unsur Kecamatan	Kecamatan Kuwarasan	
4	Suro Iryawan, S.Pd	Unsur Lembaga	SAR Tunas Kelapa	
5	Giovanni Yusuf Haryanto	Unsur Masyarakat/LSM	Forum Anak	

DELEGASI BPBD KABUPATEN KEBUMEN PADA MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

No.	Nama	Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1	Mukhsinun, S.H.I.,M.E.I	FPRB	Kebumen	

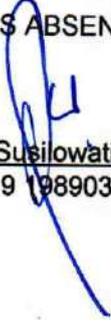
DAFTAR HADIR NARASUMBER FORUM OPD
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

BPBD KABUPATEN KEBUMEN
(Kamis, 15 Februari 2024)

NO	NAMA	G		INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
		L	P		
1	Hampoo	L		BPBD	1 
2					2
3	Endra, W	L		BPKPD	3 
4	Mufhsinuh	L		FPRB KEM	4 
5	Cahyo Riyadi	L		Bappeda	5 
6					6

Kebumen, 15 Februari 2024

PETUGAS ABSENSI


Panca Susilowati
 NIP. 19691019 198903 2 003

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM OPD
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

BPBD KABUPATEN KEBUMEN
(Kamis, 15 Februari 2024)

NO	NAMA	G		INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
		L	P		
1	Misno	L		Kecamatan Ayah	1
2	AKI	L		Kecamatan Alian	2
3				Kecamatan Ambal	3
4	Hani purwanto	L		Kecamatan Adimulyo	4
5	Muh Nander	L		Kecamatan Bonorowo	5
6				Kecamatan Buayan	6
7	Eko B	L		Kecamatan Buluspesantren	7
8	Wahyu B	L		Kecamatan Gombang	8
9	Siti Rini W.		P	Kecamatan Kebumen	9
10	Eko Joko Widodo	L		Kecamatan Karanganyar	10
11	Agus Kuntoro	L		Kecamatan Karanggayam	11
12	Parw. SIP. NEM	L		Kecamatan Kuwarasan	12
13	Yahya HM.	L		Kecamatan Klirong	13
14	Ryan Mujiharto	L		Kecamatan Kutowinangun	14
15	Setoto Prandiz	L		Kecamatan Karangsembung	15
16	Suroso	L		Kecamatan Mirit	16
17	Shub Rudy	L		Kecamatan Pejagoan	17
18	Abidin Buzli H	L		Kecamatan Prembun	18
19	Sumata		P	Kecamatan Padureso	19
20	Murti Hk	L		Kecamatan Puring	20
21				Kecamatan Petanahan	21
22				Kecamatan Poncowarno	22
23	Amir Makhud	L		Kecamatan Rowokele	23
24	Jumadi	L		Kecamatan Sruweng	24
25				Kecamatan Sadang	25
26	Y. EKO SUPRIYANTO	L		Kecamatan Sempor	26

Kebumen, 15 Februari 2024
 PETUGAS ABSENSI

Panca Susilowati
 NIP. 19691019 198903 2 003

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM OPD
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
BPBD KABUPATEN KEBUMEN
(Kamis, 15 Februari 2024)

NO	NAMA	G		INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
		L	P		
1	Puguh Sumbogo	L		BPBD	1
2	Bagus P.	L		BPBD	2
3	Iksanudin	L		BPBD	3
4	Luhur R	L		BPBD	4
5	Eko Nuraputro	L		BPBD	5
6	Rahmawati	L		BPBD	6
7	Uto #	L		BPBD	7
8	Eva Marifah		P	BPBD	8
9	Gagus J	L		BPBD	9
10	CASNAWI	L		BPBD	10
11	Umi Khomsah R.		P	BPBD	11
12	Dwi S	L		BPBD	12
13	Hasim Apandi	L		BPBD	13
14	BACHTIYAL	L		BPBD	14
15	Atan G. Hakim	L		BPBD	15
16	Sukri man	L		BPBD	16
17	Panca Susilowati		P	BPBD	17

Kebumen, 15 Februari 2024

PETUGAS ABSENSI

Panca Susilowati

NIP. 19691019 198903 2 003

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM OPD (NON PNS)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

BPBD KABUPATEN KEBUMEN
(Kamis, 15 Februari 2024)

NO	NAMA	G		LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
		L	P		
1	Suprayitno	✓		TAHAT	1
2	TEGUH . T	✓		KOWARA	2
3	Fendi Saputra	✓		Saktipena	3
4	Budi Santoso	✓		Elang Perkasa	4
5	Giovanni Yusuf.H	✓		Forum Anak Kebumen	5
6	Kasman	✓		Lewat parkara.	6
7	Supriyanto Schiawan	✓		Gertat's	7
8	Rofiq	✓		PMI	8
9	Suro Ingwan	✓		SARTUNAS	9
10	Sumarmo	✓		Bamus	10
11	MULHATAK	L		SAR - MTH	11
12	Faridono	✓		Endang Mitra Pabri	12
13	Bambang Wijanarko	✓		FPRB	13
14	Agus s (Keling)	✓		MDMC KBM	14
15	Thobroni	✓		BAGANA	15
16	Zaenul Mustopa.	✓		Banser	16
17	Bambang w	✓		PMI	17
18	NOVI RINI KURNIA		✓	Srikandi	18
19	Destia Adelita		✓	Srikandi	19
20	Yudi Widiyanto	L			20

Kebumen, 15 Februari 2024

PETUGAS ABSENSI

Panca Susilowati
NIP. 19691019 198903 2 003

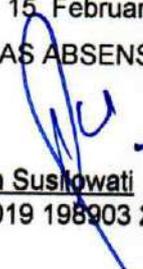
DAFTAR HADIR PESERTA FORUM OPD
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

BPBD KABUPATEN KEBUMEN
(Kamis, 15 Februari 2024)

NO	NAMA	G		INSTANSI / LEMBAGA / ALAMAT	TANDA TANGAN
		L	P		
1	Akhmad Mukhibin	L		Dmka.	1 
2	Wahid Sarwudin	L		DPUPR	2 
3	Lityawati		✓	Dinas P3A	3 
4	Wan S	L		Wda	4 
5	Rokhmah Z	L		Sabot PP	5 
6	Ulvi H.		P	Direktori	6 
7	Kharis N.		P	Diperbud	7 
8	Rahayu		P	Dinas PMD	8 
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13

Kebumen, 15 Februari 2024

PETUGAS ABSENSI


Panca Susilowati

NIP. 19691019 198903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Arungbinang No.13 Kebumen Kode Pos 54311 Telepon (0287) 381240
Faksimile (0287) 3870807 Laman <https://bpbd.kebumenkab.go.id>
Pos-el bpbdkebumenkab@gmail.com

NOTULA

- Sidang/Rapat : Rapat Forum Perangkat Daerah BPBD Kab. Kebumen
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2024
Surat Undangan :
Waktu Sidang/Rapat : Pukul 13.00 WIB s.d selesai
Acara : Forum Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025
- Ketua : Kepala Pelaksana BPBD
Sekretaris : Sekretaris BPBD
Pencatat : Eko Nursaputro
Peserta Sidang/Rapat : 1. Pejabat Struktural, Fungsional, Pelaksana dan Non ASN pada BPBD Kebumen;
2. Perangkat Daerah terkait;
3. Para Camat;
4. SAR yang ada di Kebumen;
5. Forum Pengurangan Resiko Bencana; dan
6. Forum Anak
- Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Pemaparan Terkait Dengan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Disampaikan Oleh Bapak Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc. Dari Bappeda:
- Tema Pembangunan Pada Tahun 2025 Yaitu Peningkatan Sector Pertanian, Industri Dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Perangkat Daerah Wajib Menyusun Inovasi (Minimal 1 Program 1 Inovasi) Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target Kinerja (Terutama Pengentasan Kemiskinan Di Lokasi Prioritas).
2. Pemaparan Kerangka Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang disampaikan oleh Bapak Endra Wijayanto, S.E. dari BPKPD:
- Kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, koordinasi/optimalisasi opsen PKB dan BBNKB serta pemanfaatan barang milik daerah;
- Kebijakan belanja daerah mengedepankan *money follow program priority* yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar (pemenuhan SPM), dan pencapaian target/sasaran RPJMD;

- Selain itu, juga mengedepankan mandatory spending, yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang, antara lain batasan belanja pegawai maksimal 30 persen, batasan belanja pendidikan minimal 20 persen. Akan tetapi alokasi belanja mandatory untuk infrastruktur, peningkatan kapasitas ASN, pengawasan (APIP) agar dapat disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan pendanaan yang ada.
3. Pemaparan dari Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Bapak Muhsinun, M.E.I sebagai berikut:
 - Penggalian potensi Desa Tangguh Bencana agar bisa dianggarkan pada alokasi dana desa;
 - Memperkuat Destana dengan mempersiapkan sarana dan prasana dan bisa menangani dengan baik kantar desa bila terjadi bencana;
 - Respon cepat antar desa bila terjadi bencana sehingga ada Kerjasama desa dibidang bencana.
 4. Pemaparan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen tentang Prioritas Pembangunan berdasar Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 secara makro sebagai berikut;
 - Penyampaian evaluasi kinerja BPBD Tahun 2023 terkait dengan pengelolaan kegiatan dimana realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi keuangan sejumlah 96,52 %;
 - Indikator kinerja utama BPBD pada tahun 2023 berupa presentase desa tangguh bencana sesuai dengan target yaitu 100 %;
 - Pagu indikatif BPBD Tahun 2025 sejumlah Rp.8.639.610.139,00 dengan 2 Program, 10 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan;
 - Untuk indikator kinerja tahun 2025 target yang harus dipenuhi yaitu presentase desa tangguh bencana dan capaian standar pelayanan minimal (SPM)
 5. Pembahasan/Musyawarah/Tanya Jawab/Diskusi;
 - Perwakilan dari kecamatan menanggapi tentang kondisi SAR yang ada di wilayah dalam bentuk pelatihan, dan logistik untuk SAR DOG yang ada di Kecamatan Kuwarasan;
 - Pelibatan dan partisipasi dari forum anak yang ada di Kebumen terkait dengan penanggulangan bencana;
 - Perbaiki alat EWS yang ada di Kebumen guna kesiapsiagaan bencana dan persiapan kantong pasir pada saat musim kemarau sehingga kalau musim penghujan bisa segera dipakai;

- Logistik apabila terjadi bencana khusus dalam pencarian orang pada kecelakaan laut untuk dipersiapkan secara matang pada lokasi-lokasi wisata yang ada di Kebumen.
- 6. Pemilihan dan Penetapan 1 (satu) orang delegasi Forum Perangkat Daerah dengan menerapkan Saudara Muhsinun, M.E.I sebagai delegasi dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2024;
- 7. Pembacaan dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah;
- 8. Penutup

Petugas Pencatat



Gagas Julio, A.Md. Ak
Pengatur/ Ilc
NIP. 199707282020121006

Form 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	18 Orang/bulan	12 Bulan	2.454.661.739,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.700.127.913,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	12 Dokumen	12 Bulan	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyediaan Komponen Instalasi													
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Paket	12 Bulan	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.700.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Paket	12 Bulan	48.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.800.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Paket	12 Bulan	23.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.300.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	12 Dokumen	12 Bulan	2.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.420.000,00
	Penyediaan Bahan/Material													
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Paket	12 Bulan	36.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.480.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	12 Laporan	12 Bulan	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	165.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
					-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Unit	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	110.000.000,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	55.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						174.704.000,00				172.374.000,00		
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	12 Laporan	12 Bulan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.200.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	12 Laporan	12 Bulan	125.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.500.000,00
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	12 Laporan	12 Bulan	31.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.300.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	12 Laporan	12 Bulan	16.704.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.374.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						505.000.000,00				555.500.000,00		
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	41 Unit	12 Bulan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	330.000.000,00
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
					Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	47 Unit	12 Bulan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	47 Unit	5.500.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	3 Unit	12 Bulan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	220.000.000,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						4.998.244.400,00				5.619.068.840,00		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						330.000.000,00				363.000.000,00		
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Presentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	9000 Orang	100%	330.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	9000 Orang	363.000.000,00	
1	05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							1.450.000.000,00						1.595.000.000,00
1	05 03 2.02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	280 Unit	100%	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	280 Unit	165.000.000,00	
1	05 03 2.02 0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	400 Orang	100%	160.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400 Orang	176.000.000,00	
1	05 03 2.02 0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana													
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	50 Kawasan	100%	700.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	13 Kawasan	770.000.000,00	
1	05 03 2.02 0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,00 %	90 Orang	100%	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	90 Orang	99.000.000,00	
1	05 03 2.02 0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	100%	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	110.000.000,00
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana									
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	100%	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	82.500.000,00
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggal	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	12 laporan	100%	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggal	12 laporan	82.500.000,00
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	15 Kawasan	100%	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	15 Kawasan	110.000.000,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	4 Dokumen	100%	2.160.244.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokumen	2.497.268.840,00
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadiannya	Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	100 Orang	100%	183.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadiannya	100 Orang	201.300.000,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1000 Orang	100%	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	165.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										725.000.000,00			797.500.000,00
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
					Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	4 Dokumen	100%	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 Dokumen	82.500.000,00	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
					Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Kegiatan	100%	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	1 Kegiatan	660.000.000,00	
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota													
					Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Dokumen	100%	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	55.000.000,00	
										TOTAL	8.639.810.139,00					9.604.770.753,00		

Kebumen, 15 Februari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen



Harryono Wahyudi, S.T., M.T.
Pemimpin Muda/ IVc
NIP. 197401261999031004

Form 7

Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Perangkat Daerah Tujuan	Usulan Kegiatan	Keluaran		Lokasi	Lokasi Detail	APBD Provinsi Rp	Keterangan
			Uraian	Volume				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

Kebumen, 15 Februari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen



[Signature]
Harryono Wahyudi, S.T., M.T.
Pemimpin Utama Muda/ IVc
NIP. 197401261999031004

Form 8
Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Bantuan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kab/Kota (Daerah)	Jenis Kegiatan	Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan		Permasalahan	Usul Kegiatan	Sasaran		Keluaran		Lokasi	Usulan Anggaran			Rangking	Keterangan
					Jenis Bangunan	Jenis Sub Bantuan			Uraian	Volume	Uraian	Volume		APBD Provinsi (Rp)	APBD (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							NIHIL											

Kebumen, 15 Februari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen



Henryno Wahyudi, S.T., M.T.
Peminda Utama Muda/ IVc
NIK 197401251999031004

Form 11
Tabel Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Kebumen

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Koefisien	OPD Tujuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIHIL											

Kebumen, 15 Februari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen



[Signature]
Haryono Wahyudi, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 197401261999031004

Form 12
Daftar Usulan Kegiatan Lintas OPD / Lintas Wilayah Perangkat Daerah Tahun 2025

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Totok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					NIHIL									

Kebumen, 15 Februari 2024



Kepala Relaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Kebumen

Harryono Wahyudi, S.T., M.T.
 Pemangina Utama Muda/ IVc
 NIP. 197401261999031004

